

unicef 

untuk setiap anak

INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN 2024



Cover photo:

Nino, 2 tahun, di rumahnya di Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat.

© UNICEF/Chair



Rifi bermain setelah diimunisasi polio pada putaran ke-2 Sub Pekan Imunisasi Polio nasional di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

© UNICEF/UNI59685/Prasetya



United Nations Children's Fund
World Trade Centre 2, Lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920, Indonesia

Tel.: +62 21 5091 6100
Email: jakarta@unicef.org
Website: www.unicef.or.id

Daftar Isi

07 Tahun Sarat Dampak:
Memajukan Hak-Hak
Anak di Indonesia



10 Meningkatkan Layanan
Kesehatan Demi Masa
Depan yang Lebih Baik



14 Masa Depan
yang Bebas dari
Masalah Gizi



19 Menuju Pendidikan
Bermutu untuk
Setiap Anak



22 Air Bersih,
Sanitasi Layak,
Hidup Lebih Sejahtera



26 Sistem yang Kuat
untuk Perlindungan
Anak yang Lebih Baik



31 Perlindungan Sosial
untuk Perubahan
Berkelanjutan



Stories

13 Dedikasi Terhadap
Kesehatan Ibu dan Anak
Mengubah Kehidupan

17 Di Jawa Tengah, Anak
Memimpin Upaya
Melawan Obesitas

21 Memberdayakan Ayah
dan Meningkatkan
Pendidikan Usia Dini
di Rote Timur

25 Aplikasi Baru Ubah
Wajah Akses ke Sanitasi
Aman di Indonesia

29 Kemajuan di Papua:
Memenuhi Hak Identitas
Setiap Anak Sejak Hari
Pertama

33 Aplikasi Inovatif
Mengubah Manajemen
Data Kesehatan Anak

1 Sorotan

2 2024 dalam Kilasan

34 Bersama Sektor Swasta,
Memenuhi Hak-Hak Anak

36 Pendekar Anak

37 Meraih Dampak dengan Bakat
dan Jangkauan Figur Publik

38 Suara Anak Muda, Ciptakan
Perubahan Bermakna

39 Publikasi

41 Terima Kasih!



Anak-anak bermain di depan rumah mereka di Pattilangoang, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

© UNICEF/Chair

Sorotan

Lebih dari
14 juta



anak Indonesia terlindung dari penyakit yang bisa dicegah melalui dukungan UNICEF bagi program imunisasi rutin Pemerintah Indonesia. Upaya berkelanjutan UNICEF untuk meningkatkan pemanfaatan vaksin-vaksin baru menghasilkan cakupan vaksin HPV yang tinggi—**98,6 persen** anak perempuan sasaran vaksin telah menerima dosis pertama dan **93,5 persen** telah menerima dosis kedua.

Dukungan teknis UNICEF yang memanfaatkan sumber daya pemerintah memastikan lebih dari

71.000 

anak putus sekolah melanjutkan pembelajaran dan lebih dari **176.000** anak terlindung dari risiko putus sekolah di **56** daerah di tujuh provinsi sejak 2021. 

Melalui dukungan teknis UNICEF terhadap aplikasi digital

ASIK,



bagian dari SATUSEHAT, Kementerian Kesehatan kini memiliki **79.3 juta** data kesehatan anak-anak usia

0—17 tahun, sementara fitur pengingat vaksin dan informasi kesehatan telah menjangkau **2 juta** orang tua dan **900.000** kader kesehatan.

Laporan perdana
Analisis Lanskap Iklim untuk Anak-anak di Indonesia



menyajikan bukti bahwa perubahan iklim berdampak terhadap hak-hak anak. Laporan juga berisi rekomendasi kebijakan untuk merancang layanan sosial yang tangguh iklim bagi anak. 

Mendukung program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG), buku

Pedoman Gizi 

disusun dan diuji coba dengan dukungan keahlian teknis UNICEF. Berdasarkan bukti-bukti global, UNICEF mendukung Pemerintah untuk melakukan transisi suplementasi Tablet Tambah Darah menjadi Multipel Mikronutrien Suplemen (MMS) bagi ibu hamil untuk menurunkan angka kekurangan mikronutrien dan kasus bayi lahir dengan berat badan rendah.

Daerah Bebas BABS
bertambah sebanyak

16

kota/kabupaten berkat advokasi dan dukungan teknis UNICEF di tingkat pusat dan daerah—**12 juta** orang, termasuk anak perempuan dan perempuan dewasa, kini punya akses ke sarana sanitasi layak. Total, daerah Bebas BABS naik menjadi 208, menyisakan 306 daerah lain.



Sebanyak



22.622 
anak dan **14.603**

orang tua/pengasuh menerima manfaat intervensi kesehatan mental dan psikososial berbasis komunitas melalui kolaborasi Pemerintah dan UNICEF. Program hendak diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak lagi anak dan remaja di seluruh Indonesia.

Dengan dukungan UNICEF, dana infak dan zakat senilai total

US \$13.8 juta 

dialokasikan untuk program-program responsif anak di Aceh, membantu lebih dari **84.000** penerima manfaat dan secara langsung mendukung **2.300** anak melalui akses ke program beasiswa, fasilitas sanitasi di rumah, layanan gizi, dan masih banyak lagi.



Pengguna aplikasi

Okky bertambah sebanyak
156.000 remaja putri. Sejak tahun 2021,

Okky telah menjadi tempat dan alat belajar bagi **466.000** anak perempuan untuk memahami dan mengelola kebersihan menstruasi.

Lebih dari
230
perwakilan



Badan Penanggulangan Bencana Provinsi dan Daerah, mitra masyarakat sipil, dan anggota Forum Anak di Aceh dilatih tentang rencana dan kesiapsiagaan darurat yang berpusat pada anak. Hasilnya, **60 persen** otoritas daerah yang dilatih berkomitmen menerapkan panduan yang dipelajari guna memastikan kebutuhan anak terpenuhi dalam rencana penanggulangan keadaan darurat.

2024 DALAM KILASAN

Februari

Maret

April

Mei

UNICEF dan Kementerian Agama menandatangani Nota Kesepahaman yang berisi komitmen bersama untuk membangun kapasitas pemuka agama dalam mengadvokasi hak-hak anak dan memfasilitasi dialog lintas umat tentang hak-hak anak.



Bappenas dan UNICEF meluncurkan evaluasi formatif terhadap Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Temuan dari evaluasi ini menjadi masukan dalam Peraturan Presiden tentang *stunting*.



Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan UNICEF meluncurkan Peta jalan Air Minum dan Sanitasi Aman, yang memuat strategi dan investasi yang diperlukan guna mengakselerasi pencapaian peta jalan.



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNICEF melakukan diseminasi *Studi Dasar tentang Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Orang Tua dan Anak-anak di Indonesia*, yang berisi informasi penting bagi pembuatan kebijakan dan program.



Bappenas dan UNICEF menerbitkan *Integrated Socio-Economic Registration System Design Report*, laporan tentang sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilengkapi rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan dukungan perlindungan sosial bagi anak dan keluarga yang terdampak kemiskinan dan keadaan darurat.



Juni

Agustus

September

Oktober

November

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan UNICEF meluncurkan laporan perdana Analisis *Lanskap Iklim untuk Anak-anak di Indonesia* bertepatan dengan Festival Iklim nasional.



Pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada jejaring anak muda yang melakukan advokasi dan upaya pengendalian rokok dengan dukungan UNICEF serta meluncurkan FunDoo—platform *chatbot* edukasi digital untuk remaja yang dikembangkan bersama-sama dengan UNICEF.



Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Pengasuhan Anak yang disusun dengan bantuan teknis dari UNICEF.



UNICEF mendukung pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengimpor produk terapi gizi buruk siap konsumsi (RUTF). Melalui dana pendamping, UNICEF juga menjamin tambahan 5.806 kotak RUTF untuk memastikan perawatan berkualitas bagi lebih dari 6.450 anak balita gizi buruk.



Surabaya diakui sebagai Kota Layak Anak pertama di Indonesia dan bergabung dengan Inisiatif Kota Layak Anak global yang diprakarsai UNICEF.



Forum TIK ASEAN untuk Perlindungan Anak menyoroti peran penting industri teknologi digital dalam memastikan kesejahteraan anak. UNICEF dan Kementerian KomDigi mendukung kegiatan pra-lokakarya tentang penguatan tata kelola dalam perlindungan anak di ranah digital.



Kampanye *Listen to the Future* dalam rangka Hari Anak Sedunia memobilisasi anak, pembuat kebijakan, dan para *influencer* untuk mendukung dialog antargenerasi dan memberi ruang bagi suara anak-anak tentang perubahan iklim serta beragam isu lain.



UNICEF memfasilitasi Tinjauan Bersama Tahunan Kedua Atas Sektor Pendidikan guna mengevaluasi kemajuan *Partnership Compact* dengan Indonesia yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran seluruh pelajar di Indonesia.



Kementerian Keuangan dan UNICEF menjadi tuan rumah bagi putaran final Olimpiade APBN. Kegiatan ini melibatkan 14.000 pelajar dari seluruh Indonesia dan membangun kesadaran serta keterlibatan remaja dalam penganggaran negara.





Peserta 'Lingkar Remaja', yang dirancang untuk membantu remaja mengatasi masa-kesulitan, di Jayapura, Provinsi Papua.

©UNICEF/AlAsad





Seorang ibu bermain dengan putrinya di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
©UNICEF/AlAsad

Tahun Sarat Dampak: Memajukan Hak-Hak Anak di Indonesia



Yuliana Dai Bala, membantu putrinya, Febriari Uba Sisa, usia 14 tahun, yang memiliki disabilitas ganda untuk memasuki kamar mandi di rumahnya di Pulau Adonara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

© UNICEF/UNI652617/Chair

Sebagai tahun perubahan bagi Indonesia, 2024 ditandai oleh beragam langkah politik dan kebijakan yang memperkuat komitmen akselerasi kemajuan bagi anak-anak dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Presiden terpilih baru Indonesia merumuskan visi pembangunan nasional yang tegas, mengukuhkan cita-cita jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi.

Dengan momentum yang diciptakan Pemerintah Indonesia, UNICEF mendorong pemenuhan hak-hak anak dengan menghasilkan bukti, memberikan keahlian teknis, membantu penganggaran, dan mengadvokasikan solusi-solusi yang teruji. Melalui kerja sama erat dengan pemerintah dan beragam mitra lain, intervensi inovatif yang berdampak besar bagi anak serta keluarganya dapat dicoba, dievaluasi, dan diperluas pelaksanaannya di seluruh negeri.

Dukungan UNICEF terhadap pemerintah memastikan bahwa lebih dari 14 juta anak menerima imunisasi dasar. Upaya lebih jauh diambil untuk menjangkau anak-anak berstatus *zero dose* (belum menerima vaksin apa pun) di 10 provinsi prioritas melalui

kampanye imunisasi susulan dan introduksi empat vaksin yang mampu melindungi nyawa—pneumokokal konjugat, rotavirus, *Japanese encephalitis*, dan HPV. UNICEF juga mendukung upaya respons wabah campak, difteri, dan polio serta digitalisasi data imunisasi yang berguna meningkatkan akses dan efisiensi layanan.

Dengan isu *stunting* yang tetap menjadi prioritas nasional, evaluasi formatif atas Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting yang didukung UNICEF telah menghasilkan temuan penting untuk memperkuat upaya penanggulangan malnutrisi secara berkelanjutan. Kampanye digital pencegahan *stunting* UNICEF menjangkau 18 juta orang. Perluasan program Manajemen Terpadu Masalah Gizi Akut ke 78 persen kota/kabupaten di sejumlah provinsi sasaran utama UNICEF memastikan 7,6 juta anak balita mendapatkan layanan skrining dan lebih dari 36.000 anak *wasting* berat mendapatkan perawatan yang menyelamatkan nyawa.

Dukungan bagi anak-anak putus sekolah diperluas ke 56 kota/kabupaten di tujuh provinsi, lebih tinggi dari target 50 kota/kabupaten. Upaya ini membantu mencegah 176.000 anak putus sekolah dan memfasilitasi 71.300 anak untuk kembali belajar. Program Pembelajaran Kelas Awal diperluas ke 34 dari 37 kota/kabupaten sasaran, dan pemerintah-pemerintah provinsi di Papua mengalokasikan anggaran US\$4,3 juta untuk peningkatan skala program. Layanan PAUD juga diperluas ke 33 dari 34 kota/kabupaten sasaran; sebanyak 18.000 anak menerima manfaat dari perbaikan praktik mengajar.

UNICEF bekerja sama erat dengan pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan perlindungan anak dan memperluas akses ke layanan terpadu bagi anak dan perempuan rentan. Program kesehatan mental berbasis masyarakat, yang memberikan dukungan psikososial penting, telah menjangkau lebih dari 22.600 anak dan 14.600 pengasuh. Intervensi pengasuhan anak melibatkan 63.000 orang tua, membekali keluarga-keluarga dengan pengetahuan dan sumber daya untuk menciptakan lingkungan bertumbuh yang lebih aman bagi anak.

Didukung oleh UNICEF, Pemerintah Indonesia meluncurkan peta jalan nasional yang berisi strategi untuk menyediakan sanitasi yang dikelola dengan aman kepada 60 juta penduduk Indonesia dan layanan air yang dikelola dengan aman kepada 100 juta penduduk pada 2030. Pada akhir 2024, 195 dari 214 kota/kabupaten sasaran dinyatakan Bebas BAB Sembarangan (BABS), sehingga meningkatkan angka penduduk di daerah Bebas BABS menjadi 12 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Asesmen WASHFIT (*Water and Sanitation for Health Facility Improvement Tool*) menghasilkan penyediaan layanan air, sanitasi, dan kebersihan yang tangguh iklim serta inklusif di 182 puskesmas di 18 kota/kabupaten dengan lebih dari 6,1 juta penerima manfaat. Pelajaran dari program ini disertakan di dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan, yang menargetkan akses universal kepada layanan air dan sanitasi dasar di semua puskesmas pada 2029.

Laporan perdana *Analisis Lanskap Iklim untuk Anak-Anak* berisi rekomendasi untuk memperkuat integrasi aksi iklim dalam kebijakan, hukum, dan rencana di sektor sosial. Inisiatif pelibatan anak muda telah memberdayakan anak dan remaja, selaku pemangku kepentingan utama dalam masa depan berkelanjutan Indonesia, untuk mengambil peran aktif dalam mengarahkan solusi iklim.

UNICEF turut berperan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, memastikan integrasi hak-hak anak dan perlindungan sosial. UNICEF memperkenalkan sistem penandaan anggaran (*tagging*) untuk standarisasi definisi belanja anggaran untuk anak dan menyediakan tinjauan yang komprehensif tentang investasi terkait anak—termasuk alokasi anggaran bagi anak dengan disabilitas. Dikembangkan melalui kolaborasi dengan tujuh kementerian, sistem ini akan dihubungkan dengan sistem perencanaan daerah di bawah Kementerian Dalam Negeri, sehingga menguatkan pengambilan keputusan berbasis bukti bagi kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kepentingan anak.

UNICEF meluncurkan Strategi Remaja, disusun bersama dengan anak muda, untuk menguatkan kebijakan dan layanan bagi remaja. Program multisektor di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan telah membekali lebih dari 127.000 remaja perempuan dengan kecakapan hidup—hasilnya adalah peningkatan nyata dalam kecakapan hidup yang penting, seperti pengambilan keputusan, pengetahuan yang jauh meningkat tentang layanan sosial, dan kepercayaan diri yang lebih besar untuk menolak perkawinan anak. Hal-hal ini penting bagi transformasi sosial secara luas dan perlindungan anak.

UNICEF juga memfasilitasi pembuatan mekanisme untuk melacak keterlibatan remaja dalam penyusunan kebijakan, kini dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keterlibatan remaja digunakan sebagai indikator kota layak anak.

Pedoman Perencanaan Kontingensi yang Berpusat pada Anak, yang merupakan bagian dari Pedoman Nasional Perencanaan Kontingensi, telah resmi diluncurkan. Sejalan dengan hal ini, UNICEF, melalui kolaborasi erat dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, terus menguatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dan para mitra mengenai perencanaan dan respons bencana yang berpusat pada anak. Peningkatan kapasitas bagi pejabat provinsi dan daerah, organisasi masyarakat sipil, dan jejaring pemuda di Aceh menghasilkan 60 persen otoritas daerah yang dilatih berkomitmen menerapkan pedoman tersebut, agar setiap rencana aksi penanggulangan bencana sejak saat ini selalu meliputi pemenuhan kebutuhan anak secara jelas.

Muhammad Yahya, seorang mahasiswa di Pusat Pembelajaran Masyarakat Nadya di Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, menghabiskan waktu bersama putra dan istrinya. Muhammad didukung untuk kembali belajar setelah putus sekolah karena tantangan ekonomi.

© UNICEF/UN0848116/
Al Asad



Epson Dowansiba (bertopi), memerankan
teman-temannya di sekolah mereka,
Sekolah Dasar Nuni Inpres,
di Manokwari, Provinsi Papua Barat.
© UNICEF/Wilander



Meningkatkan Layanan Kesehatan Demi Masa Depan yang Lebih Baik

Penguatan sistem kesehatan dan peningkatan capaian kesehatan ibu, anak, dan remaja merupakan target-target penting bagi Indonesia. Pada 2024, UNICEF terus mendukung agenda transformasi kesehatan Indonesia dan prioritas sektor kesehatan, dengan perhatian khusus pada peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir, anak-anak, dan remaja.

Upaya pemerintah, yang didukung oleh UNICEF, memastikan ketersediaan imunisasi dasar bagi lebih dari 14 juta anak. Di Indonesia, terdapat 622.000 anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi rutin apa pun—angka yang menempatkan Indonesia di peringkat keenam dunia untuk populasi anak “zero dose”. Langkah-langkah percepatan diambil untuk menjangkau anak berstatus *zero dose* di 10 provinsi prioritas melalui kampanye imunisasi susulan, disertai introduksi empat vaksin yang mampu melindungi nyawa, yaitu vaksin pneumokokal konjugat, rotavirus, *Japanese encephalitis*, dan *human papilloma virus* (HPV).

Upaya penanggulangan wabah yang didukung UNICEF telah melindungi ribuan anak di daerah-daerah berisiko setelah terjadi wabah campak dan difteri. Melalui kolaborasi erat dengan Kementerian Kesehatan, UNICEF menyediakan dukungan luas bagi langkah respons cepat terhadap wabah polio di 27 provinsi, mengadakan vaksin, melatih tenaga dan kader kesehatan, dan menggerakkan dukungan sektor swasta, figur publik, media, dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan angka vaksinasi. Kampanye digital yang mendukung upaya imunisasi polio dari pemerintah berhasil telah menjangkau 55 juta orang.

Kementerian Kesehatan dan UNICEF bekerja sama untuk melakukan digitalisasi data imunisasi nasional. Digitalisasi meningkatkan pelacakan vaksin dan logistik sekaligus mengurangi inefisiensi. Melalui aplikasi digital ASIK, bagian dari SATUSEHAT, data kesehatan 79,3 juta anak berusia 0—17 tahun telah tercatat. Fitur pengingat imunisasi dan informasi kesehatan pun telah menjangkau dua juta orang tua dan 900.000 kader kesehatan.

Peningkatan akses kepada layanan bermutu untuk ibu dan bayi baru lahir tetap menjadi agenda prioritas. Peraturan Presiden, yang disusun dengan dukungan UNICEF, berisi langkah-langkah percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak menjadi tonggak pencapaian penting.

UNICEF juga memainkan peran penting dalam pembaruan pedoman Maternal dan Perinatal-Surveilans dan Respons (MPDSR) serta uji cobanya di 11 rumah sakit. Dengan pedoman ini, tenaga kesehatan dapat menilai penyebab kematian ibu dan bayi baru lahir dengan lebih baik, untuk kemudian mencegah peristiwa serupa terjadi di kemudian hari. Bukti-bukti dari fase uji coba akan membantu Kementerian Kesehatan dalam mempercepat implementasi nasional MPDSR.

Kemajuan signifikan turut dicapai melalui inisiatif Perbaikan Mutu (PM) yang diuji coba di 52 rumah sakit di seluruh Indonesia pada 2024 dengan dukungan dari UNICEF. Menggunakan pedoman PM, tim layanan kesehatan mengenali dan mengatasi tantangan spesifik dalam pemberian layanan berkualitas dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Berdasarkan keberhasilan fase uji coba ini, Kementerian Kesehatan akan memperluas implementasi PM ke seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia.

Narendra yang berusia tiga bulan diperiksa berat badannya, ditemani ibunya, pada putaran ke-2 Sub-Pekan Imunisasi Polio nasional di sebuah puskesmas terpadu di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

© UNICEF/UNI596966/Prasetya





Seorang kader muda menjelaskan gejala anemia pada Jambore Pemuda yang berfokus pada kesehatan yang diselenggarakan oleh PKPR Puskesmas (Layanan Kesehatan Ramah Remaja) di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.
© UNICEF/UNI728224/Nuraeni

menyusun Buku Saku Tata Laksana Tuberkulosis Anak sebagai panduan praktis bagi tenaga kesehatan, dan membekali 3.000 staf kesehatan lain di seluruh Indonesia dengan kemampuan mendiagnosis dan mengobati TB anak secara efektif.

Dengan bantuan teknis dari UNICEF, bertambah 14 kota/kabupaten di Indonesia timur yang berstatus bebas malaria pada 2024. Indonesia pun kian dekat dengan target eliminasi malaria pada 2023. Lebih dari tiga perempat dari 514 kota/kabupaten endemis malaria kini telah mencapai status eliminasi malaria. UNICEF juga bekerja sama dengan WHO dan Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) untuk menyusun Peta Jalan Eliminasi Malaria 2025-2045.

Tantangan kesehatan yang dihadapi remaja dan anak muda kian besar. Mengetahui hal ini, UNICEF meluncurkan kampanye digital seputar penyakit tidak menular, kesehatan mental, dan penyalahgunaan zat. Kampanye yang menjangkau 570.000 remaja ini memberikan informasi dan sumber daya kesehatan penting terkait, antara lain, kesehatan mental, penyalahgunaan zat, berhenti merokok, dan vaksinasi HPV. Informasi yang sama akan disosialisasikan lebih luas melalui platform SATUSEHAT untuk memastikan meningkatnya pemanfaatan layanan imunisasi HPV, kesadaran tentang pencegahan penyakit tidak menular, dan akses kepada perawatan yang sesuai.

Lebih jauh, UNICEF memfasilitasi dialog publik untuk menjawab isu keselamatan lalu lintas bagi anak dan remaja. Dialog ini menghasilkan saran kebijakan yang menggarisbawahi gentingnya tantangan ini. Cedera akibat kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian pada kelompok usia 15—19 tahun (12 persen kematian atau 3,500 kematian per tahun) dan menimbulkan beban ekonomi yang besar. Rekomendasi utama meliputi peraturan yang lebih tegas terhadap penggunaan helm, batasan kecepatan, edukasi keselamatan berlalu lintas, keamanan infrastruktur, sistem surveilans nasional, dan kolaborasi multisektor yang efektif.

Untuk meningkatkan kebijakan berbasis bukti dan mengarahkan kebijakan kesehatan masyarakat Indonesia, UNICEF berkontribusi kepada desain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 serta memimpin upaya dalam memetakan akses layanan kesehatan. UNICEF memberikan pengetahuan berbasis bukti yang meningkatkan kesetaraan akses di 514 kota/kabupaten di ke-38 provinsi Indonesia. UNICEF juga mendukung perhitungan Indeks Sumber Daya Manusia di tingkat daerah.

UNICEF terus mendorong fasilitas kesehatan agar menjadi fasilitas cerdas iklim. UNICEF melakukan asesmen awal dan mendorong praktik berkelanjutan, seperti manajemen limbah secara ramah lingkungan dan penerapan energi berkelanjutan. Dengan dukungan UNICEF, dibentuk Centre of Excellence on Climate Change and Health di bawah mitra universitas untuk akselerasi riset dan pertukaran pengetahuan.

Menurut laporan *Global Tuberculosis (TB) 2024* dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia memiliki angka kasus TB tertinggi kedua di dunia, dan 1 dari setiap 5 kasus TB terjadi pada anak. UNICEF bermitra dengan Kementerian Kesehatan untuk

DEDIKASI TERHADAP KESEHATAN IBU DAN ANAK MENGUBAH KEHIDUPAN

"Ini panggilan hidup saya," kata Petroni Labantuan yang akrab disapa Bidan Inche. "Tangan seorang bidan menyelamatkan dua nyawa, yaitu nyawa ibu dan bayinya."

Selama hampir tiga dekade, sosok Inche tidak terpisahkan dari Puskesmas Niki-Niki di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mendedikasikan diri untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di komunitasnya.

Tidak hanya membantu persalinan, Inche juga membimbing bidan lain dan tak jarang harus mengorbankan waktu pribadi demi menjawab panggilan darurat. "Kadang-kadang, baru tidur satu atau dua jam, saya sudah dipanggil lagi untuk membantu persalinan," ceritanya.

Angka mortalitas anak di NTT adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia, antara lain karena akses ke layanan kesehatan berkualitas terbatas dan perawatan medis tertunda akibat kepercayaan tradisional seperti "naketi"—keluarga meminta nasihat tetua desa dan memilih ramuan tradisional alih-alih mencari bantuan medis. "Kami sering menjumpai anak yang kondisinya sudah terlambat untuk mendapat pengobatan yang efektif," jelas Inche.

Sejak tahun 2019, UNICEF bekerja sama erat dengan pemerintah setempat untuk memperbaiki kondisi kesehatan ibu dan anak, antara lain dengan kartu kesehatan keluarga yang membantu orang tua tahu kapan anak membutuhkan perawatan segera. Pada tahun 2020, Kementerian Kesehatan mengadopsi kartu ini secara nasional dan menjangkau kelompok rentan, seperti ibu dan anak-anak balita.

Saat ini, Inche dan tenaga kesehatan lain telah dilatih menerapkan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), dengan fokus pada rawatan komprehensif bagi balita. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) membantu mengedukasi orang tua tentang pengasuhan tepat di rumah dan kapan perawatan medis diperlukan. "KIA sangat membantu saya menjelaskan ke orang tua bahwa anak sakit harus segera dibawa [ke puskesmas]," kata Inche.

Di wilayah terpencil, seperti desa Maunum, Suster Lili juga menghadapi tantangan akibat praktik naketi. "Setiap kali ada anak yang sakit, keluarganya bilang, anak itu sedang ditegur oleh leluhurnya. Di setiap rumah yang kami kunjungi, kami harus bekerja keras meyakinkan keluarga agar anak segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat," jelasnya. "Setelah kami dilatih pelatihan dan pengetahuan bertambah, rasanya lebih mudah juga dalam membujuk keluarga pasien."

Yuliana dan Marten dari Maunum adalah orang tua dari Sami yang berusia delapan bulan. Dulu, saat Sami sakit, mereka mengandalkan ramuan tradisional seperti campuran bawang dengan minyak untuk digosokkan ke tubuh. Setelah bertemu dengan Inche, Yuliana dan Marten kini menggunakan buku KIA untuk memantau kesehatan Sami dan membawa Sami ke puskesmas saat diperlukan.

Sekarang, Sami lebih sehat dan aktif, dan Yuliana bersyukur atas bimbingan yang diberikan tenaga kesehatan. "Jangan abaikan keberadaan fasilitas kesehatan serta peran para kader dan tenaga kesehatan," pesan Yuliana kepada orang tua lain.

► Petronela Banamtuan (Inche), Koordinator Bidan Puskesmas Niki-Niki, menjelaskan Buku Kesehatan Ibu dan Anak kepada warga desa di Desa Maunum, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

© UNICEF/UNI639648/Chair



Petronela Banamtuan (Inche), Koordinator Bidan Puskesmas Niki-Niki, memeriksa seorang anak di Desa Maunum, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

© UNICEF/UNI639648/Chair



Masa Depan yang Bebas dari Masalah Gizi

UNICEF adalah mitra berdedikasi yang membantu Pemerintah Indonesia dalam upaya memperbaiki gizi anak dan mengatasi tiga ancaman masalah gizi: 1 dari 12 anak balita *wasting* (terlalu kurus untuk tinggi badannya), 1 dari 5 menderita *stunting* (terlalu pendek untuk usianya), dan angka anak dengan berat badan berlebih dan obesitas bertambah.

Sebagai capaian penting, UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan evaluasi terhadap Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Evaluasi komprehensif ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan perubahan perilaku sebagai penggerak utama kemajuan yang berkelanjutan. Temuan ini menjadi landasan dalam penyusunan Strategi Nasional 2025–2029 serta pemutakhiran Peraturan Presiden tentang Penurunan Stunting guna memastikan dampak jangka panjang.

UNICEF bersama Kementerian Kesehatan mendorong penguatan sistem informasi gizi di tingkat nasional dan daerah guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data. Penguatan kapasitas dalam pengelolaan data—mulai dari pengumpulan hingga analisis indikator Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)—telah meningkatkan kemampuan teknis pembuat kebijakan di Kementerian Kesehatan maupun Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memahami praktik pemberian makan anak. Hasil penguatan ini menjadi dasar dalam penyusunan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS 2025), yang kini telah diselaraskan dengan standar global WHO dan UNICEF.

Dalam rangka mendukung ketahanan gizi dan memperkuat upaya fortifikasi, UNICEF memprakarsai *Kajian Lanskap Fortifikasi Pangan Skala Besar*—studi pertama di Indonesia yang secara komprehensif mengulas aspek ini. Kajian tersebut merumuskan strategi untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program fortifikasi pangan. Rekomendasi yang dihasilkan menjadi masukan strategis bagi penyusunan kebijakan gizi dan ketahanan pangan nasional, guna memastikan gizi mikro esensial dapat diakses oleh anak-anak dan keluarga di seluruh Indonesia.

Program Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi diperluas ke 48 kota/kabupaten lain, sehingga memastikan program menjangkau anak-anak di 78 persen kota/kabupaten di provinsi target UNICEF (175 dari 223 daerah). Perluasan ini meliputi integrasi pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA) ke layanan puskesmas dan posyandu, sehingga kasus gizi buruk dapat terdeteksi dengan cepat dan lebih dini. Hasilnya, 7,6 juta balita telah menjalani skrining *wasting* dengan 36.514 anak balita gizi buruk mendapatkan perawatan yang menyelamatkan nyawa mereka.

Tingkat pengetahuan dan perubahan perilaku tidak dapat dipisahkan dari pencegahan masalah gizi. Pada 2024, UNICEF meluncurkan kampanye digital nasional tentang pencegahan *stunting* yang menjangkau lebih dari 18 juta orang. Menggunakan pendekatan perubahan sosial dan perilaku serta data penting perilaku, kampanye ini berfokus pada praktik pemberian makan dan pengasuhan yang tepat.

UNICEF berperan besar dalam penguatan Program Gizi pemerintah, dengan menguji coba integrasi layanan gizi dan kesehatan di Jawa Timur yang menjangkau lebih dari 56.000 ibu hamil. Uji coba ini menghasilkan temuan



Lengan anak diukur menggunakan pita pengukur lingkaran lengan tengah atas di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

penting terkait pendekatan paling efektif untuk melaksanakan layanan gizi terpadu, seperti penyediaan Multiple Mikronutrien Suplemen (MMS), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan edukasi gizi yang dilakukan bersama dengan layanan pemeriksaan kehamilan. Temuan juga mendukung upaya pemerintah untuk memperluas paket layanan terpadu, yang hendak menjangkau lebih dari 4,8 juta ibu hamil setiap tahun, sehingga dapat menurunkan angka komplikasi kehamilan dan risiko masalah gizi pada bayi baru lahir.

Usai fase uji coba, UNICEF memperluas paket intervensi gizi di sekolah, yang dibuat berbasis bukti, di empat kota/kabupaten di Jawa Tengah dan menjangkau lebih dari 3.400 anak. Belajar dari temuan selama uji coba, UNICEF mendukung Kementerian Pendidikan mengimplementasikan Gerakan Sekolah Sehat yang menjangkau 14.000 anak di delapan kota/kabupaten di enam provinsi. Kajian

akhir program pada tahun 2025 akan mengevaluasi dampak dan rencana perluasan.

Melalui kerja sama erat dengan Bappenas dan Badan Gizi Nasional, UNICEF memberikan dukungan keahlian teknis untuk merancang pedoman dan standar komprehensif bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional yang baru pertama kali dilaksanakan ini adalah bagian dari inisiatif *quick win* presiden guna menyediakan makanan bergizi dan edukasi gizi kepada jutaan pelajar serta ibu hamil dan menyusui.

Pedoman tersebut meliputi tata kelola dan manajemen,

keamanan pangan, pengadaan, dan pemantauan dan evaluasi. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, UNICEF juga menyusun standar pangan dan gizi bagi MBG. UNICEF akan memperluas dukungannya terhadap MBG pada 2025, termasuk melalui studi, desain solusi inovatif, pelatihan bagi pemangku kepentingan, dan dengan mendukung program agar mampu menjangkau anak dan ibu di wilayah-wilayah terpencil.

Melalui studi tentang pemasaran makanan tidak sehat, obesitas dan kesehatan mental, dan gizi di sekolah, UNICEF menghasilkan bukti-bukti penting bagi pencegahan obesitas; pembaruan analisis lanskap obesitas; dan studi dasar (*baseline*) tentang gizi anak usia sekolah di Jawa Tengah. Studi-studi ini mendukung pembuatan kebijakan penting, termasuk penyusunan strategi nasional untuk mencegah obesitas dan revisi peraturan label makanan pada muka kemasan. Studi juga mendukung rencana pembangunan nasional dan daerah. Kampanye digital untuk pencegahan obesitas menjangkau lebih dari enam juta penduduk di seluruh Indonesia.

Menimbang ancaman perubahan iklim yang makin tinggi terhadap gizi anak, UNICEF menerbitkan laporan atas studi inovatif berjudul *Perubahan Iklim dan Gizi di Indonesia: Tinjauan Bukti untuk Penguatan Kebijakan dan Program*. Laporan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak agar aspek ketangguhan iklim disertakan dalam kebijakan gizi nasional. Temuan laporan menyebutkan pentingnya membangun sistem pangan yang cerdas iklim untuk menjamin ketahanan pangan dalam jangka panjang dan perlindungan kesehatan anak-anak di tengah beragam tantangan lingkungan.



Seorang guru di SMPN 3 Lumajang di Provinsi Jawa Timur berbicara dengan siswanya tentang pentingnya memiliki pola makan seimbang, makan makanan sehat dan menjaga gaya hidup aktif, sebagai bagian dari program gizi Aksi Bergizi.

© UNICEF/UNI722264/
Chair

DI JAWA TENGAH, ANAK MEMIMPIN UPAYA MELAWAN OBESITAS

Seperti banyak anak lainnya, pola makan Kenzo, 10 tahun, pelajar di Semarang, Jawa Tengah, dulu tak sehat. Ia gemar camilan dan kekurangan asupan gizi esensial. "Saya tidak tahu makan sayur dan minum air putih yang cukup setiap hari itu penting," akunya.

Hal tersebut berubah setelah Kenzo menjadi Kapten Bergizi di sekolahnya melalui program Petualangan Bergizi dari UNICEF. Bagian dari Usaha Kesehatan Sekolah, program baru ini hendak membina perilaku sehat dan memperbaiki lingkungan makanan di sekolah melalui permainan yang menarik.

Sebagai Kapten Bergizi, Kenzo bertugas mengedukasi teman-teman sekelas dengan menceritakan pengetahuannya tentang gizi. "Setiap kali memimpin kegiatan Petualangan Bergizi, saya rasanya tambah sehat," katanya dengan bangga. "Saya bisa berbagi informasi dengan teman, dan sekarang saya pilih makanan tanpa penguat rasa."

Petualangan Bergizi digagas untuk merespons isu kesehatan masyarakat yang mengemuka di Indonesia, yaitu kelebihan berat badan dan obesitas. Diperkirakan, hampir satu juta anak balita, satu dari lima anak usia 5-12 tahun, dan satu dari tujuh remaja usia 13-18 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Diluncurkan pada tahun 2023 di Tegal, Petualangan Bergizi diperluas pada tahun 2024 hingga menjangkau lebih dari 1.000 pelajar kelas empat di Semarang, Solo, dan Kudus.

Edukasi gizi, skrining kesehatan, kebun sekolah, dan pilihan makanan yang lebih sehat di kantin sekolah tercakup dalam program tersebut. "Saya banyak belajar dari permainan gizi. Makan sehat jadi menyenangkan," kata Ayla, 10 tahun, pelajar lain di sekolah Kenzo. "Biasanya, mama yang menyiapkan sarapan, tapi hari ini saya bantu siapkan nasi, ayam, dan tempe."



▼
Siswa belajar tentang pentingnya gizi seimbang dari guru mereka, yang mencerminkan pendekatan komprehensif program untuk pendidikan gizi.
©UNICEF/Pilav



▼
Siswa terlibat dalam kegiatan bercocok tanam di kebun sekolah mereka, sebagai bagian dari program percontohan Petualangan Bergizi di Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
©UNICEF/Pilav

Di samping edukasi gizi, Petualangan Bergizi juga memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak yang kesulitan mengatasi kelebihan berat badan. Sinta Wati dari Dinas Kesehatan Semarang memuji kolaborasi dengan UNICEF ini, yang menurutnya memberikan manfaat nyata.

"Melalui kolaborasi yang baik dengan UNICEF, kami sudah melihat hasil nyata. Mudah-mudahan, program ini bisa diadakan di lebih banyak sekolah," ujarnya.

Tahap uji coba program telah selesai pada bulan November 2024. Program direncanakan diperluas pelaksanaannya ke lebih banyak sekolah dan provinsi pada 2025.

Kenzo bangga menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas dari lingkungan sekolahnya. "Kita tidak hanya sedang mengubah diri sendiri, tetapi juga lingkungan sekitar kita."



Gian Ken Dethan, seorang siswa di Pusat Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kristen Mokdale di Kota Ba'a, Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berpartisipasi dalam kegiatan belajar melalui bermain di sekolah tersebut.

© UNICEF/UNI469234/Al Asad



Menuju Pendidikan Bermutu untuk Setiap Anak

Inisiatif yang didukung UNICEF memainkan peran penting dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Kemajuan telah dicapai, namun masih terdapat kesenjangan dalam hal kesetaraan akses pendidikan, khususnya pada kelompok anak dengan disabilitas dan pelajar PAUD serta pelajar tingkat sekolah menengah.

Gerakan untuk menjangkau anak putus sekolah, yang diperkirakan berjumlah 3,9 juta anak di seluruh Indonesia, terus meluas. Pada 2024, di Jawa Tengah, gerakan ini diperluas ke 14 kota/kabupaten sehingga terdapat total 56 kota/kabupaten lokasi program atau melampaui target UNICEF sebanyak 50 kota/kabupaten pada akhir Country Programme periode ini (2021-2025).

Sejak 2021, aksi kolektif yang didukung oleh UNICEF telah mencegah 176.000 anak (49 persen perempuan dan 51 persen lelaki) putus sekolah dan memfasilitasi 71.300 anak (43 persen perempuan dan 57 persen lelaki) untuk melanjutkan pembelajaran—atau total 42 persen dari 169.000 anak putus sekolah yang teridentifikasi dan membutuhkan bantuan.

Keberhasilan tersebut didorong oleh pemerintah daerah yang berkomitmen kuat dalam menyesuaikan intervensi dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan agar anak melanjutkan proses belajarnya. Pada 2024, pemerintah nasional mengakui praktik-praktik baik di Sulawesi Selatan, sementara pemerintah provinsi dan daerah di Nusa Tenggara Timur meluncurkan inisiatif kembali ke sekolah serta menyusun peraturan provinsi guna menurunkan angka anak putus sekolah di seluruh kota/kabupaten.

Sejalan dengan hal di atas, agar anak yang melanjutkan pembelajaran di luar sistem formal juga mendapat dukungan, UNICEF bekerja sama erat dengan Kementerian Pendidikan untuk mengintegrasikan Modul Pemberdayaan Remaja ke dalam sistem Pendidikan Non-Formal (PNF) di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka membekali remaja dengan kecakapan penting abad ke-21 serta pengetahuan tentang isu-isu utama, seperti kesehatan mental, pencegahan perkawinan usia anak, dan kesehatan serta kebersihan menstruasi, inisiatif tersebut menjangkau lebih dari 6.700 pelajar (45 persen perempuan, 55 persen lelaki). Kajian akhir program mengonfirmasi hasil-hasil positif dari proses belajar dan pemberdayaan, khususnya di kalangan pelajar perempuan. Temuan kajian mendukung rencana perluasan program di tingkat nasional, termasuk integrasi modul ke dalam platform pembelajaran PNF dengan memanfaatkan forum guru PNF guna memperluas jangkauan modul.

Peningkatan mutu layanan PAUD yang didukung UNICEF diperluas ke 33 dari 34 kota/kabupaten sasaran, termasuk sembilan kota/kabupaten tambahan pada 2024. Dengan begitu, sebanyak 18.652 anak (49 persen perempuan, 51 persen lelaki) menerima manfaat dari praktik mengajar yang kian baik. Di Nusa Tenggara Timur dan Papua, 7.167 dari 7.700 orang tua dan pengasuh yang menjadi sasaran program dilibatkan untuk melakukan praktik pengasuhan yang baik di rumah,



Siswa membaca buku cerita di TK Beringin, Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

© UNICEF/UN0792666/
Wilander

sehingga mendukung pertumbuhan anak usia dini secara holistik sekaligus memungkinkan anak membangun fondasi yang mereka butuhkan untuk mewujudkan potensi tumbuh kembangnya secara optimal.

Untuk membangun kebutuhan terhadap program pengasuhan anak nasional, UNICEF dan pemerintah berkolaborasi menyusun Strategi Nasional Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pengasuhan. Strategi ini diuji coba di 175 desa di 34 provinsi dan melipatgandakan partisipasi orang tua pada kelompok-kelompok pengasuhan bayi antara bulan Juni dan September (dari 6.045 ke 13.244 peserta). Melihat hasil positif ini, pemerintah pun berkomitmen untuk melaksanakan strategi secara nasional pada 2025.

Program Pembelajaran Kelas Awal (*Early Grade Learning/EGL*) merupakan program utama dari UNICEF dan para mitranya untuk meningkatkan keterampilan literasi dan numerik dasar dari anak-anak usia muda, khususnya yang berada di perdesaan dan wilayah terpencil. EGL bertujuan meningkatkan kualitas dan inklusivitas belajar mengajar di SD dan PAUD.

Pada 2024, EGL diperluas ke lima kota/kabupaten lain di Papua, sehingga menjangkau total 34 dari 37 daerah sasaran di Indonesia timur. Keberhasilan program, termasuk dalam hal hasil pembelajaran anak, mendorong pemerintah daerah di Papua untuk mengalokasikan US\$4,3 juta bagi replikasi dan peningkatan skala implementasi EGL. Hal ini menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah daerah terhadap program meningkat dan program dapat berjalan secara berkelanjutan.

MEMBERDAYAKAN AYAH DAN MENINGKATKAN PENDIDIKAN USIA DINI DI ROTE TIMUR



Siswa di PAUD Pembina di taman bermain di halaman sekolah.
© UNICEF/UNI469333/AI Asad

Wajah Sultan Alfarizki, empat tahun, berseri-seri bangga saat memamerkan karya seninya: mozaik berbentuk burung terbuat dari potongan daun kering. "Pak, lihat. Ini burung kenari!" serunya, sambil ayahnya, Wahyu Martono, mengangguk bangga.

Di Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, kehadiran seorang ayah di PAUD Pembina tergolong langka. Bagi Sultan, kehadiran ayahnya menjadi penyemangat, terlebih karena ia bercita-cita menjadi seorang polisi seperti Wahyu.

Sebelum Agustus 2023, sosok ayah atau pengasuh lelaki jarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan PAUD. Hal ini berubah setelah PAUD mulai mengadakan kegiatan tentang pengasuhan anak bagi kedua orang tua dan para pengasuh. "Saya tekankan, anak adalah milik ibu dan bapak, dan tanggung jawab atas anak ada pada keduanya," ujar Yumina Sere, kepala sekolah yang telah mengajar sejak tahun 1986.

Kegiatan tersebut adalah bagian dari program yang didukung UNICEF untuk memperluas akses ke layanan PAUD dan menyediakan pengasuhan berkualitas di wilayah-wilayah terpencil. Guru seperti Yumina diberikan pelatihan pedagogi dengan fokus pada pembelajaran berbasis permainan dan pembuatan materi ajar menggunakan bahan-bahan dari lingkungan sekitar.

"Kita bisa pakai bahan-bahan yang ada di desa sebagai alat belajar, mulai dari daun kering berwarna-warni dibentuk menjadi kupu-kupu, sampai cangkang kerang cantik dari pantai dekat desa untuk belajar berhitung atau mengurutkan," kata Yumina.

Program tersebut juga meningkatkan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan orang tua tentang, misalnya, kesehatan, gizi, dan pengasuhan bertanggung jawab. Orang tua diundang datang ke PAUD dan melihat sendiri praktik belajar sambil bermain, sehingga perhatian orang tua tidak tertuju kepada hasil tes anak, melainkan kepada pengalaman anak sehari-hari.

Sampai dengan awal 2024, program telah menjangkau 50 PAUD di seluruh Nusa Tenggara Timur dan Papua, dan menargetkan membawa manfaat kepada 4.800 anak, 4.800 orang tua, dan 390 guru dalam tiga tahun ke depan.

Semenjak Sultan bersekolah di PAUD, orang tuanya memperhatikan peningkatan terhadap daya konsentrasi dan respons Sultan. Mereka senang bahwa PAUD banyak mengajarkan tentang kebersihan dan perilaku sopan. "Saya bersyukur sekali bisa menyekolahkan anak di PAUD yang gurunya profesional dan memiliki macam-macam permainan edukatif," kata Wahyu.

▶ Sultan Alfarizki, siswa PAUD Pembina bersama orang tuanya, di sekolah yang terletak di Rote Timur, Pulau Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

© UNICEF/UNI469342/AI Asad



Air Bersih, Sanitasi Layak, Hidup Lebih Sejahtera

Pada 2024, UNICEF mengambil langkah signifikan untuk memperluas akses layanan air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) di seluruh Indonesia. Langkah ini memberi manfaat untuk jutaan anak dan keluarganya serta mendukung komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Keberlanjutan keenam (SDG 6), yaitu mewujudkan akses universal kepada layanan air bersih dan sanitasi pada 2030.

Peluncuran Peta Jalan Air Minum Aman Nasional, beserta implementasi pertamanya di Sulawesi Selatan, merupakan tonggak dan langkah penting untuk menghadirkan akses ke air minum yang dikelola dengan aman.

Disusun dengan dukungan dari UNICEF dan disatukan dengan Peta Jalan Sanitasi Aman Nasional, strategi di dalam peta jalan menunjukkan target besar Pemerintah Indonesia: menyediakan air yang dikelola dengan aman kepada 100 juta penduduk dan layanan sanitasi yang dikelola dengan aman kepada 60 juta penduduk pada 2030.

Agar implementasi berjalan berkesinambungan, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah setempat di sejumlah daerah kunci, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Banda Aceh, untuk menyusun peta jalan daerah beserta kebutuhan anggarannya. Peta jalan perlu diintegrasikan dengan strategi pembangunan tingkat provinsi dan daerah, sehingga tujuan nasional-daerah selaras dan perluasan akses ke sanitasi yang dikelola dengan aman dapat berjalan terstruktur serta terkoordinasi.

Kampanye publik bertema air, sanitasi, dan kebersihan melalui platform digital menjangkau hampir 800.000 orang di seluruh di Indonesia. Kampanye ini menguatkan praktik air dan sanitasi aman serta perilaku bersih di tingkat masyarakat.

Berkat advokasi berkelanjutan dan kolaborasi erat bersama Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah, 16 kota/kabupaten yang didukung UNICEF (dari total 23 kota/kabupaten) dan satu provinsi (Jawa Timur) berhasil meraih status Bebas BAB Sembarangan (BABS) pada 2024. Status ini secara langsung memperbaiki mutu sanitasi bagi 12 juta penduduk yang tersebar di Provinsi Aceh, Jawa Timur, dan Papua.

Kementerian Kesehatan menggunakan pendekatan yang sama agar delapan provinsi lain di Sumatra dan Kalimantan dapat mencapai status Bebas BABS. Didukung anggaran pemerintah, target baru daerah Bebas BABS telah disertakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

UNICEF terus mendukung peningkatan layanan WASH di puskesmas melalui program WASH FIT (*Water and Sanitation for Health Facility Improvement Tool*). Pada 2024, dilakukan perbaikan di 182 puskesmas di 18 kota/kabupaten (di Sulawesi Selatan, Aceh, Banten, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua)—melampaui target 12 puskesmas dan memberikan manfaat kepada 6,1 juta orang.



Seorang anak laki-laki mencuci
muka di depan rumahnya di desa
Tlogopakis di Provinsi Jawa Tengah.
© UNICEF/UN0353548/Ijazah

Perbaikan fasilitas tersebut tidak lupa menyertakan prinsip tangguh iklim dan inklusivitas, sehingga perempuan, anak, dan penyandang disabilitas memiliki akses yang sama ke layanan air bersih dan sanitasi. Agar perbaikan berkesinambungan, sebanyak 750 pejabat pemerintah dan staf puskesmas dilatih menerapkan metodologi asesmen WASHFIT agar mampu mengevaluasi kondisi WASH di fasilitas kesehatannya dan mengetahui langkah yang diperlukan agar layanan WASH tangguh iklim serta inklusif.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat edukasi kesehatan dan kebersihan menstruasi di kalangan remaja, UNICEF melanjutkan promosi aplikasi Oky di sekolah maupun di tempat-tempat lain. Hasilnya, pengguna Oky bertambah sebanyak 156.000 anak perempuan—secara total, 466.000 anak perempuan menggunakan Oky untuk mengelola kebersihan menstruasinya dengan aman dan percaya diri (naik dari 100.000 pengguna pada 2022).

Sepanjang tahun, UNICEF menjajaki solusi pembiayaan inovatif guna mendukung investasi jangka panjang untuk infrastruktur WASH dan pelaksanaan layanannya pada skala yang luas. Di Jawa Timur, dilakukan upaya-upaya awal untuk mengerahkan sumber daya bagi sektor WASH melalui obligasi pemerintah daerah. Di Lombok Timur dan Lumajang, inisiatif pembiayaan syariah yang didukung oleh UNICEF memfasilitasi penyediaan toilet dan tangki septik baru yang dikelola dengan aman bagi 1.100 pengguna. Hal ini menunjukkan betapa model pembiayaan alternatif dapat menjadikan layanan air bersih dan sanitasi lebih terjangkau dan mudah diakses.



Melalui kegiatan advokasi dan kemitraan strategis, UNICEF menggalang sekitar US\$16 juta pendanaan dari sektor swasta dan publik untuk intervensi-intervensi WASH pada 2024. Investasi ini mempercepat kemajuan Indonesia menuju akses universal ke layanan air bersih dan sanitasi, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan membangun masyarakat yang lebih tangguh.

Memanfaatkan anak muda sebagai pendorong perubahan yang luar biasa, lebih dari 25.000 remaja berpartisipasi dalam

jajak pendapat tentang isu WASH di platform U-Report milik UNICEF. Masukan anak muda dikompilasi dalam laporan berjudul *Apa yang Ada di Pikiran Anak Muda: Pandangan Anak Muda Seputar Isu Air, Sanitasi, dan Kebersihan di Indonesia*. Dirancang untuk memberikan masukan pada pembuatan kebijakan, laporan diumumkan kepada anak muda pada Forum Air Dunia dan kepada pembuat kebijakan serta pemangku kepentingan pemerintah. Hal ini mencerminkan komitmen Bappenas dan UNICEF untuk melibatkan anak muda Indonesia dalam isu-isu WASH.

▼
Nur Salwa, mencuci tangan sebelum memasuki kelas di Sekolah Dasar Pasandang Inpres, Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
© UNICEF/UNI468834/
Al Asad

APLIKASI BARU UBAH WAJAH AKSES KE SANITASI AMAN DI INDONESIA

Hanifah, ibu tiga anak asal Desa Wonorejo di Lumajang, Jawa Timur, masih ingat tantangan hidup tanpa sarana sanitasi yang layak. “Kami tidak punya jamban sendiri di rumah,” katanya. “Untuk BAB, harus ke sawah dulu, termasuk di malam hari dengan senter. Berbahaya, apalagi di musim hujan karena jalannya licin.”

Pengalaman Hanifah jamak terjadi di Indonesia, di mana 4 persen rumah tangga masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS)—praktik yang menyebabkan penyebaran penyakit. Meski 80 persen rumah tangga memiliki sarana sanitasi dasar, hanya 10 persen yang mengelola limbah manusia dengan aman, dan masih banyak yang tidak punya akses ke layanan sanitasi yang andal.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia, dengan dukungan dari UNICEF telah meluncurkan aplikasi *One Stop Shop* (OSS) yang saat ini tengah diuji coba. OSS menghubungkan konsumen dengan produk dan layanan sanitasi serta penyedia pinjaman, sehingga akses sarana sanitasi lebih mudah dan terjangkau, khususnya di daerah-daerah yang kurang terlayani.

Lumajang telah berstatus Bebas BABS pada 2021, namun layanan sanitasi aman masih menjadi tantangan. Tidak semua rumah dan fasilitas publik sudah punya jamban layak dan tangki septik. Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Lumajang dr. Marshall Trihandono berkata, “Jamban tidak layak dapat mengakibatkan pencemaran dan penyakit seperti diare yang bisa berujung anak *stunting*. Limbah tinja yang tidak diolah seringnya mengalir ke sungai dan meresap ke air tanah, sehingga merusak lingkungan. Pencemaran ini mengganggu mutu air dan merugikan ekosistem setempat.”

Ingin menjawab masalah, OSS menghubungkan rumah tangga dengan penyedia layanan pembersihan tangki septik agar limbah tinja dibuang dan diolah dengan aman. Di OSS, konsumen juga dapat mencari tukang terampil dan produk sanitasi terjangkau. Hal ini masih langka, terutama di kawasan perdesaan. OSS pun menyediakan estimasi biaya dan opsi pembayaran yang fleksibel. Rumah tangga berpendapatan tidak menentu tetap dapat memperbaiki sarana sanitasi tanpa mengalami beban keuangan.



Seorang petugas sanitasi di Lumajang di atas truk pengendap lumpur, yang memainkan peran penting dalam mengelola pembuangan limbah.

© UNICEF/Pilav



Seorang anak perempuan mencuci tangan di dekat rumahnya di Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

© UNICEF/UNI473308/Chair

Sebagai petani, Hanifah senang dengan produk dan layanan terjangkau serta layanan sesuai kemampuan di OSS. “Tidak semua tukang paham soal tangki septik. Aplikasi ini menyediakan pekerja yang tepat,” katanya.

Saru’ah, warga lain asal Lumajang, menantikan kehadiran layanan praktis berkat OSS.

“OSS memberi tahu apa yang harus dilakukan setelah jamban tersedia, khususnya terkait penyedotan,” katanya. “Ada pilihan membayar dengan mencicil di aplikasi, yang berarti semua warga desa bisa punya jamban layak di rumah. Lega, tidak perlu lagi khawatir tergelincir di jalanan berlumpur atau menemukan kantong plastik berisi kotoran di sawah.”

Dengan memperbaiki sarana sanitasi dan menurunkan risiko kesehatan dan lingkungan hidup, aplikasi OSS mendukung Indonesia mewujudkan akses universal ke sanitasi aman dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Sistem Lebih Kuat, Perlindungan Lebih Baik Bagi Anak

Pada 2024, UNICEF melakukan beragam upaya untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan praktik merugikan, dengan kesehatan mental dan kesejahteraan psikosial sebagai prioritas. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat untuk memastikan agar setiap anak Indonesia tumbuh dengan aman dan dengan dukungan yang baik.

UNICEF memainkan peran penting dalam penguatan kerangka hukum dan kebijakan perlindungan anak. Pencapaian utama dalam hal ini meliputi disertakannya indikator penting perlindungan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029) dan disahkannya peraturan turunan dari UU Kekerasan Seksual.



Peserta program Dayah Ramah Anak yang didukung UNICEF, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dan aman di Dayah Madinatuddiniyah Jabal Nur, Paloh Lada di Provinsi Aceh.

© UNICEF/UNI569101/
Chair

Pemerintah menyusun peta jalan perlindungan anak di dunia maya dengan dukungan UNICEF, yang akan dilaksanakan selaras dengan RPJMN. Kampanye nasional #JagaBareng untuk mencegah penganiayaan dan eksploitasi seksual anak di dunia maya menjangkau 55 juta orang pada 2024 (atau lebih dari 80 juta sejak diluncurkan pada 2023) dan menarik lebih dari empat juta pengunjung web yang ingin tahu cara mengakses layanan.

Pada 2024, Indonesia mempertahankan kepemimpinan dalam meningkatkan sistem Perlindungan Anak. Upaya difokuskan untuk mengatasi tantangan yang masih ada, termasuk menjangkau anak perempuan dan lelaki yang paling rentan dan berisiko, serta

memastikan layanan perlindungan yang berkualitas dan tangguh tersedia di seluruh Indonesia.

UNICEF bekerja sama erat dengan pemerintah untuk meningkatkan kerangka hukum dan kebijakan perlindungan anak serta memperluas akses dan ketersediaan layanan terpadu bagi anak dan perempuan rentan di 330 dari 514 kota/kabupaten di 28 dari 38 Provinsi sejauh ini. Program kesehatan mental berbasis masyarakat, yang memberikan dukungan psikososial penting, menjangkau lebih dari 22.600 anak-anak dan 14.600 pengasuh. Intervensi pengasuhan melibatkan 63.000 orang tua, membekali keluarga dengan pengetahuan dan sumber daya untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.

UNICEF bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), beserta badan PBB lain, termasuk United Nations Population Fund (UNFPA), untuk mendukung penyusunan perangkat implementasi strategi nasional pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah. Pada tingkat provinsi, UNICEF mendukung pemerintah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan yang membuat strategi daerah untuk pencegahan perkawinan anak.



Seorang ibu dan putrinya yang berusia delapan tahun, penyintas perlakuan salah seksual, di rumah mereka di Provinsi Jawa Tengah. Keduanya menerima dukungan berkelanjutan dari pekerja sosial melalui intervensi yang didukung UNICEF.

© UNICEF/ Chair

Upaya-upaya tersebut turut menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan. Dari 2022 hingga 2024, angka perkawinan anak di Jawa Timur turun dari 9,46 persen ke 7,78 persen; turun dari 9,33 persen ke 8,09 persen di Sulawesi Selatan, dan turun dari 16,23 persen ke 14,96 persen di Nusa Tenggara Barat. Upaya sistematis UNICEF di level nasional, provinsi, hingga desa amat penting dalam penurunan prevalensi perkawinan anak secara nasional dari 8,06 persen pada 2022 menjadi 5,90 persen pada 2024.

Berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, UNICEF membuat pedoman dan perangkat asesmen terhadap anak berhadapan dengan hukum, kemudian melatih petugas senior di lembaga pembinaan anak (LPKA) untuk menggunakannya. Bersama Polri, UNICEF menyusun modul pelatihan. Pelatihan diselenggarakan untuk petugas polisi yang menangani kasus kekerasan terhadap anak. Perangkat-perangkat ini akan diadopsi secara nasional untuk dimanfaatkan oleh petugas LPKA dan kepolisian di Indonesia, sehingga memperkuat sistem perlindungan anak secara keseluruhan.

Untuk membantu memastikan implementasi program perlindungan anak secara efektif di tingkat daerah, UNICEF dan Kementerian Dalam Negeri menyusun dan menguji pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif terhadap Perlindungan Anak. Bersama dengan Kementerian Desa, UNICEF menyusun pedoman serupa untuk memperkuat mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat. Hingga saat ini, 350 desa di enam provinsi telah merumuskan mekanisme tersebut dan terdapat rencana untuk memperluas penerapannya secara bertahap di seluruh Indonesia.

Sejak diluncurkan tahun 2021, ROOTS, inisiatif pencegahan perundungan yang didukung UNICEF dan telah diperluas oleh pemerintah, telah menjangkau 2,2 juta pelajar di 36.000 dari total 109.000 SMP/SMA dan SMK—atau 41 persen dari total sekolah menengah di Indonesia. Menurut survei dampak program, pemahaman anak tentang kekerasan meningkat, mekanisme pelaporan kini lebih baik, dan sekolah lebih responsif terhadap kejadian perundungan.

Dengan dukungan UNICEF, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) meluncurkan dan melaksanakan modul *'Helping Adolescents Thrive'* di empat provinsi (Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua). Modul ini membekali keluarga Indonesia dengan pengetahuan untuk mendukung kesehatan mental remaja. Melebihi target, modul menjangkau 22.622 anak (8.024 lelaki dan 14.598 perempuan) dan 14.604 orang tua/pengasuh. Modul ini tengah diintegrasikan dengan program Generasi Berencana (GenRe) dari BKKBN untuk memperkuat ketangguhan remaja dan berpotensi menjangkau 7,3 juta remaja di seluruh negeri.

UNICEF mendukung KPPPA memperluas keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang khusus menangani korban kekerasan. Sampai dengan akhir 2024, 333 dari 514 kota/kabupaten di 34 dari 38 provinsi telah mengoperasikan UPTD PPA, dengan 276 kota/kabupaten menerima pendanaan pemerintah senilai total US\$8,5 juta.

Bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan tingkat pencatatan kelahiran yang rendah, termasuk Papua, UNICEF menguji coba inisiatif pencatatan kelahiran terpadu di fasilitas kesehatan. Dengan menyederhanakan proses dan meningkatkan cakupan, upaya ini meningkatkan cakupan anak dengan akta kelahiran sehingga hak-hak mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dapat dipastikan. Inisiatif ini diharapkan bisa diperluas, khususnya di wilayah terpencil dengan tingkat pencatatan kelahiran rendah.

Untuk meningkatkan efektivitas respons perlindungan anak pada situasi darurat, UNICEF menyusun pedoman lintas sektor guna mendukung koordinasi di antara pemangku kepentingan, seperti kementerian, dinas, dan pemerintah daerah.

KEMAJUAN DI PAPUA: MEMENUHI HAK IDENTITAS SETIAP ANAK SEJAK HARI PERTAMA

Pasca bersalin di RS Yowari di Jayapura, Papua, ketidaknyamanan fisik yang dirasakan Cremilda Kwanimba berganti menjadi sukacita saat menerima akta kelahiran bayi lelakinya, Gregorius. "Saya lega sekali," katanya sambil menyeka air mata bahagia. "Saya melahirkan jam lima pagi tadi, dan lima jam kemudian sudah mendapatkan akta kelahiran anak tanpa biaya apa-apa."

Cremilda dan suaminya, Paul, bertekad melindungi hak-hak dasar anak mereka, termasuk hak mendapatkan akta kelahiran. Sayang, dua anak mereka yang lebih besar tumbuh tanpa akta. Cremilda kesulitan mengurus akta sembari mengasuh anak-anak, sementara Paul, sebagai pencari nafkah, sulit mendapatkan cuti, padahal kantor kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) jaraknya jauh dari rumah dan hanya beroperasi di hari-hari kerja.

Pasangan ini tidak sendirian. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022, 86 persen anak di bawah usia 18 tahun di Papua punya akta lahir, namun angka ini turun ke hanya 50,26 persen untuk anak usia 0-4 tahun atau jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 92 persen dan 81 persen. Berdasarkan analisis tahun 2019, UNICEF mengidentifikasi beberapa kendala utama di Papua: hambatan budaya dan sosial, hambatan geografis (akta kelahiran diterbitkan cuma-cuma, tetapi biaya perjalanan tinggi), dan kurang pengetahuan tentang pencatatan kelahiran dan prosesnya.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, UNICEF dan pemerintah meluncurkan program Penguatan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (CVRS) di Papua pada 2021. CVRS mendukung pemerintah provinsi dan kota/kabupaten di Papua untuk melaksanakan strategi nasional, membuat model pencatatan sipil yang inovatif dengan teknologi informasi. Program ini juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencatatan sipil dan statistik hayati di masyarakat, termasuk di PAUD dan rumah sakit.

Pada Maret 2022, RS Yowari menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kantor Dukcapil Kota Jayapura untuk merampingkan proses penerbitan akta kelahiran untuk semua bayi yang dilahirkan di RS Yowari. Kesepakatan ini membuahkan sistem daring yang mengintegrasikan layanan kependudukan dengan data rumah sakit.



Seorang perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dengan putra Cremilda Kwanimba yang baru lahir
© UNICEF/UNI520628/AI Asad



Kepala Administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, Sugeng Budiono, menyerahkan akta kelahiran bayi Cremilda Kwanimba yang baru lahir, di rumah sakit di Jayapura, Provinsi Papua.

© UNICEF/UNI520631/AI Asad

"Belajar dari pengalaman, kini kami melaksanakan kebijakan untuk memastikan seluruh proses pencatatan kelahiran selesai dalam satu hari," ujar Kepala Dinas Dukcapil Jayapura Herald J. Berhito. "Kami juga membuka loket khusus untuk lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, dan kami mengambil langkah khusus untuk mendatangi desa-desa terpencil agar setiap anak mendapatkan akta kelahiran sebagai hak mereka."

Setelah kebijakan baru ini diimplementasikan di Jayapura, angka pencatatan kelahiran naik drastis, dari 85,27 persen pada 2021 ke 96,19 persen pada 2022 menurut data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD). Hal ini membantu penduduk mengakses layanan penting, seperti imunisasi, secara tepat waktu dan memastikan sasaran penerima imunisasi diidentifikasi dengan akurat. Cremilda tak perlu cemas lagi, karena dua anaknya yang tertua, yang akan mengikuti PAUD, kini bisa mendapatkan akta kelahiran dan mengamankan hak-hak mereka.



Rizka dan Nuril bermain di dekat
rumah mereka di Desa Umbul,
Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
© UNICEF/UNI473436/Chair



Perlindungan Sosial untuk Perubahan Berkelanjutan

Sebagai perekonomian terbesar ke-16 di dunia, Indonesia terus berproses untuk bertransisi menjadi perekonomian berpendapatan menengah-atas. UNICEF berperan penting memastikan agar anak dan keluarga yang paling rentan tidak tertinggal dalam transisi ini. UNICEF menghasilkan bukti-bukti penting dan mengadvokasikan reformasi kebijakan sosial untuk mendorong perubahan sistemis.

Pada 2024, UNICEF tetap berada di garda depan pengembangan kebijakan dan reformasi sosial, memastikan indikator penting terkait anak disertakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta rencana pembangunan jangka panjang dan menengah di tingkat daerah. Penyusunan Indeks Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak telah memperkuat kemampuan Indonesia dalam melacak dan mengatasi masalah kesejahteraan anak secara luas.

Angka kemiskinan anak turun teratur dalam beberapa tahun terakhir, namun satu dari delapan anak di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada 2024, UNICEF mendukung penyusunan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan dan merancang Kartu Kesejahteraan Sosial untuk mengidentifikasi dan mendukung keluarga rentan.

UNICEF terus mempelajari cara-cara baru untuk memobilisasi sumber daya bagi anak-anak melalui kemitraan dengan pemerintah daerah. Dengan dukungan UNICEF, dana zakat dan infak sebesar US\$13,8 juta dialokasikan untuk program-program terkait anak di Aceh pada tahun 2021 dan 2022, mendukung akses ke layanan esensial bagi lebih dari 84.000 orang, termasuk bantuan langsung bagi 2.300 anak. UNICEF akan terus bekerja sama dengan pemerintah, universitas, dan mitra PBB lainnya untuk memperluas penggunaan pembiayaan inovatif.

UNICEF memperkenalkan *Multidimensional Deprivation Index* (MDI), indeks yang mengukur kemiskinan dan kekurangan akses di luar tingkat pendapatan. Indikator terkait anak yang disertakan di dalam MDI membantu pemerintah untuk mengidentifikasi anak yang mengalami kekurangan ini dalam berbagai bentuk, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan air bersih. MDI bertujuan menjadi dasar kebijakan dan program penurunan angka kemiskinan anak dan memperbaiki layanan sosial.

Untuk meningkatkan akses ke data yang andal dan bukti, serta untuk berkontribusi kepada dialog kebijakan, UNICEF memimpin studi-studi penting, termasuk penilaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan anak, dampak COVID-19 terhadap anak, dan pemantauan kemiskinan yang terus berjalan. Temuan studi dipertimbangkan dalam diskusi kebijakan, seperti penyusunan RPJMN, dan hasil analisis kemiskinan anak diintegrasikan ke dalam strategi penurunan kemiskinan RPJMN.

Menggunakan teknik analitik canggih, seperti *Small Area Estimation*, UNICEF meningkatkan Dashboard SDG Indonesia dan memperbarui Rencana Aksi Daerah, memperkirakan 166 indikator SDG di tingkat provinsi dan memberikan pemerintah informasi berbasis bukti untuk mengatasi kesenjangan. Hal ini menguatkan perencanaan dan hasil kebijakan bagi anak-anak di seluruh Indonesia.



▼
Rahman Demeru
Katinting dan
saudaranya di rumah
mereka di Desa Balong,
Bulukumba di Provinsi
Sulawesi Selatan.
© UNICEF/UN0848127/
Al Asad

Komitmen UNICEF untuk memperkuat sistem perlindungan sosial Indonesia menghasilkan kemajuan signifikan di bidang kebijakan. Bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial, UNICEF mendukung modernisasi sistem pencatatan sosial nasional dan menguji coba cara-cara memperbarui basis data agar program bantuan sosial dapat dipastikan menjangkau anak-anak yang paling rentan. Temuan dari proses uji coba ini menjadi pertimbangan dalam dialog kebijakan, termasuk dalam penyempurnaan alat survei, pelatihan enumerator, dan pemantauan mutu.

UNICEF juga mendukung evaluasi proses Geunaseh, program bantuan tunai yang berorientasi pada anak di Aceh dan yang melayani sekitar 5.300 anak. Temuan dan rekomendasi praktis untuk menguatkan relevansi, efektivitas, dan efisiensi program diulas bersama dengan pejabat pemerintah setempat dan Bappenas dalam diskusi tingkat tinggi yang mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, UNICEF mendukung asesmen kelayakan “lumbung sosial” (tempat-tempat penyimpanan barang esensial untuk digunakan

segera dalam kondisi darurat). Bermitra dengan Kementerian Sosial, UNICEF merancang inisiatif percobaan untuk membiayai lumbung sosial dengan dana non-publik, memanfaatkan pembiayaan risiko bencana dan asuransi melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan.

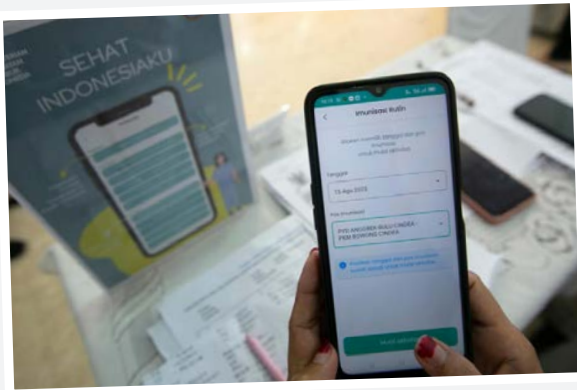
Upaya inovatif guna memastikan perencanaan dan penganggaran di daerah sudah responsif terhadap kebutuhan anak untuk jangka panjang termasuk pengembangan sistem penandaan anggaran (*budget tagging*) menggunakan kecerdasan buatan. Diinisiasi bersama tujuh kementerian, alat ini menstandarkan definisi belanja terkait anak, sehingga investasi untuk anak terlacak dengan jelas, termasuk anak dengan disabilitas dan inisiatif lain yang berfokus pada gender. Kementerian Dalam Negeri berencana mengintegrasikan inovasi ini ke dalam sistem perencanaan daerah.

Sistem Manajemen Informasi (SIM) untuk melacak masukan remaja terhadap perencanaan dan pemantauan tindak lanjut masukan oleh pemerintah daerah juga dibuat. Setelah diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SIM akan diintegrasikan dengan inisiatif Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA)—kerangka yang dirancang untuk memastikan terdapat kebijakan ramah anak di tingkat daerah. SIM juga akan disertakan dalam Peraturan Presiden tentang KLA yang akan direvisi pada 2025.

Pada 2024, UNICEF berperan penting mendukung Pemerintah Kota Surabaya untuk menjadi Kota Layak Anak pertama di Indonesia. Surabaya pun bergabung dengan Inisiatif Kota Layak Anak global dari UNICEF dan menjadi tolok ukur nasional bagi pemerintah daerah lain yang juga ingin melibatkan anak dan remaja dalam pembuatan kebijakan yang berdampak terhadap kehidupan mereka.

UNICEF terus menguatkan pengetahuan anak dan remaja tentang kebijakan fiskal, desentralisasi, dan perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Untuk itu, UNICEF mendukung Lomba Bedah Data APBD yang diadakan Kementerian Keuangan dan menarik lebih dari 5.500 pelajar sebagai peserta. Di tingkat nasional, UNICEF mendukung Olimpiade APBN dengan peserta sebanyak hampir 14.000 pelajar SMA (8.536 perempuan dan 5.261 lelaki) serta 5.000 guru.

APLIKASI INOVATIF MENGUBAH MANAJEMEN DATA KESEHATAN ANAK



Seorang Petugas Kesehatan memasukkan data ke aplikasi ASIK saat kegiatan imunisasi di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.

© UNICEF/UNI461939/Prasetya

Selama bertahun-tahun, tenaga kesehatan seperti Novi Yuliana, seorang koordinator imunisasi di Banda Aceh, bergulat menangani data kesehatan manual di atas kertas yang rentan kesalahan dan penundaan. Pada 2022, Kementerian Kesehatan, didukung oleh UNICEF, bergerak mengubah keadaan ini.

Solusi datang berupa Aplikasi Sehat Indonesia-Ku (ASIK), aplikasi yang mudah digunakan dengan ponsel dan komputer. "Kami membuat ASIK bersama-sama dengan calon penggunanya, agar kebutuhan mereka pasti terpenuhi. Kami ingin proses transisi dari kertas ke sistem digital berjalan mulus," kata I Made Suwancita, Technology for Development Officer UNICEF.

Diluncurkan tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan dengan dukungan UNICEF, ASIK telah mendigitalkan data kesehatan dari 48,6 juta anak Indonesia.

Setelah tahap uji coba yang sukses di Aceh, ASIK pun diperluas penerapannya ke seluruh nusantara. "Melihat dampaknya di Aceh, kami pun percaya diri untuk melakukan perluasan," ujar Haditya Mukri, Data Centre Officer UNICEF.

Sebelum ASIK hadir, tenaga kesehatan mencatat data imunisasi secara manual di buku jurnal yang tebal. Informasi penting sering kali hilang atau rusak, sehingga akses anak kepada vaksinasi pun berisiko terganggu. Kini, data *real-time* memungkinkan respons cepat terhadap kebutuhan vaksinasi. Perlindungan kesehatan bagi setiap anak pun dapat dipastikan terpenuhi.

"Mimpi saya, ASIK dapat dipakai oleh semua tenaga kesehatan untuk memastikan setiap data imunisasi lengkap dan akurat," kata Novi. "Anak-anak yang sehat berarti masa depan juga sehat."

Dari yang awalnya dibuat untuk menampung data vaksinasi, ASIK kini berkembang kemampuannya. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melacak imunisasi rutin, deteksi dini penyakit tidak menular, dan informasi lain pada tingkat puskesmas. Pada 2023, lebih dari 10.000 puskesmas (98,5 persen) menggunakan ASIK.

Dewi Nur Aisyah, Penasihat Teknis Layanan Kesehatan Primer di Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan, mengatakan, "ASIK membuat jutaan penduduk Indonesia terhubung dengan layanan kesehatan, dan kami berterima kasih kepada UNICEF atas dukungannya selama ini untuk meningkatkan implementasi ASIK di seluruh Indonesia."



Novi Yuliana, seorang pekerja imunisasi di Banda Aceh, Provinsi Aceh, menunjukkan aplikasi mobile ASIK miliknya.

© UNICEF

Selain ASEAN Digital Award, ASIK juga diangkat sebagai studi kasus pada tahun 2024 oleh Observatory for Public Sector Innovation di bawah Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Risdianto Irawan, Technology for Development Specialist di Kantor Regional UNICEF, Bangkok, menjelaskan alasan di balik kisah sukses ini: "UNICEF mendukung transformasi digitalisasi layanan kesehatan dengan membuat aplikasi bersama dengan calon penggunanya, memastikan skala pemanfaatan aplikasi bisa diperluas, dan menjawab isu privasi data. ASIK adalah contoh luar biasa dari wujud prinsip UNICEF yang selalu mengedepankan hak-hak anak melalui solusi digital."



Bersama Sektor Swasta, Memenuhi Hak-Hak Anak

Setiap anak berhak menerima layanan sosial yang bermutu agar potensinya dapat diwujudkan sepenuhnya. Layanan ini termasuk pendidikan, gizi, kesehatan, dan perlindungan. UNICEF percaya, perubahan nyata dapat diraih saat kami bergandengan tangan dengan para mitra yang memiliki kesamaan visi. Selama satu tahun belakangan, kolaborasi kami dengan dunia usaha, yayasan, dan pemangku kepentingan kunci lainnya telah menciptakan peluang bagi anak-anak untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang.

Laporan tahunan ini menunjukkan dampak luar biasa yang dihasilkan oleh kerja sama kami dan kehidupan yang kami sentuh. Setiap pencapaian tidak akan terjadi tanpa dedikasi dan kemurahan hati para mitra, dan kami amat bersyukur atas dukungan yang selalu mereka tunjukkan demi membangun masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak.



1. Anak-anak bermain dengan blok kayu, bagian dari sarana tumbuh kembang usia dini yang disediakan melalui kemitraan UNICEF Indonesia dan Prudence Foundation, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
2. WINGS for UNICEF, bekerja sama dengan SoKlin, meluncurkan kampanye “Generasi Bersih Sehat” pada 13 Juni 2024, mempromosikan layanan air, sanitasi dan kebersihan yang inklusif di sekolah-sekolah untuk menciptakan generasi yang bersih dan sehat.
3. Kimberly-Clark Softex Indonesia menyoroti kerja samanya dengan UNICEF untuk mendukung kesehatan dan kebersihan menstruasi anak perempuan pada Hari Kebersihan Menstruasi yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. UNICEF, dengan dukungan dari Tanoto Foundation, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Jenewa Madani untuk memberikan pendidikan dan layanan gizi esensial kepada salah satu komunitas paling terpinggirkan di Selayar, Sulawesi Selatan. Inisiatif ini memperkuat upaya pemerintah untuk menurunkan angka *stunting* di Indonesia.

Prudential

Kemitraan kami dengan UNICEF berfokus menyiapkan anak untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah, sejalan dengan visi Prudential untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya Di



Setiap Kehidupan, Untuk Masa Depan semua generasi. Pada 2024, program kerja sama kami diperluas ke tiga daerah, meningkatkan layanan pembelajaran dan pengembangan di 130 PAUD. Kemitraan ini melampaui ekspektasi dengan menjangkau lebih banyak anak dan memenuhi semua targetnya. Kolaborasi kami secara signifikan turut memperkuat kapasitas pemerintah dan akses ke layanan PAUD berkualitas, dan secara langsung berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 – Pendidikan Berkualitas yang Inklusif dan Merata.

Tony Benitez,
Presiden Direktur, Prudential Indonesia



WINGS Group

Melalui kampanye WINGS for UNICEF #GenerasiBersihSehat, tahun ini kami melanjutkan komitmen WINGS Group dalam mendukung akses air, sanitasi, dan kebersihan dasar (WASH) yang inklusif bagi anak-anak Indonesia. Bersama brand andalan Ibu Indonesia, SoKlin, program ini telah menjangkau lebih dari 3 ribu anak di Aceh, Sulawesi Selatan, dan NTT, untuk meningkatkan kesadaran dan mewujudkan kebersihan mulai dari lingkungan sekolah sebagai langkah konkret membentuk generasi penerus yang berdaya saing, sejalan dengan misi Indonesia Emas 2045. Berawal Dari Bersih wujudkan Generasi Bersih Sehat!

Joanna Elizabeth Samuel,
Marketing Manager Household Category,
WINGS Group Indonesia



Kimberly-Clark Softex

Kerjasama kami dengan UNICEF Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap remaja putri Indonesia di daerah Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Kami berharap dengan kerjasama ini akan dapat semakin membantu remaja putri di Indonesia Timur untuk mengelola menstruasi mereka dengan aman dan higienis, serta hidup dalam lingkungan yang bersih dan higienis.

Dmytro Badyvskyi,
Presiden Direktur, Kimberly-Clark Softex
Indonesia

Tanoto Foundation

Kemitraan kami dengan UNICEF dalam upaya penanggulangan *stunting* di Indonesia telah menunjukkan dampak, di mana pada tahun 2024, melalui strategi komunikasi perubahan perilaku, telah menjangkau lebih dari 3 juta ibu hamil dan pengasuh, melatih lebih dari 10.000 tenaga kesehatan, serta melibatkan hampir 45 juta orang dalam meningkatkan kesadaran akan pencegahan *stunting*. Pencapaian ini menegaskan kekuatan aksi kolaborasi dalam menciptakan dampak transformatif. Seiring dengan perjalanan ini, Tanoto Foundation tetap berkomitmen untuk mendukung misi UNICEF dalam mewujudkan masa depan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi anak-anak Indonesia. Bersama, kita dapat mendorong perubahan positif, mengoptimalkan potensi setiap anak, dan menciptakan dampak yang berkelanjutan.



Belinda Tanoto,
Anggota Dewan Wali Amanat, Tanoto Foundation.
Anggota UNICEF International Council.



Major Donor

Saya sangat percaya bahwa berinvestasi pada anak-anak adalah salah satu cara terbaik untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Karya luar biasa UNICEF di

lapangan dalam memenuhi hak anak-anak memberi saya harapan dan sukacita, karena saya tahu kontribusi saya turut serta dalam upaya yang sangat berarti ini. Mendukung UNICEF berarti berinvestasi pada masa depan di mana setiap anak berdaya untuk mencapai potensi terbaik mereka.

Johan Buntoro,
Major Donor Individu UNICEF Indonesia



MARI JADI BAGIAN DARI PERUBAHAN

Saat bermitra dengan kami, sumber daya, jejaring, dan keahlian Anda menghasilkan perubahan berkelanjutan bagi anak-anak. Bersama, kita bangun masa depan yang lebih cerah, #ForEveryChild.

<https://www.unicef.id/partnership>

Faaz, usia dua tahun, yang pulih dari masalah gizi melalui intervensi yang didukung UNICEF, diukur dengan pita lingkar lengan atas di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

© UNICEF/Sinulingga



Pendekar Anak



Saya merasa beruntung dapat terlibat sebagai Pendekar Anak yang memiliki fokus mendalam pada kesejahteraan anak-anak di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Berbagi bukanlah hal

yang mudah bagi banyak orang, namun dengan tekad untuk melakukan kebaikan dan memberi manfaat selama hidup, saya yakin bahwa dengan Pendekar Anak dan UNICEF Indonesia, setiap langkah akan bermakna. Semoga kontribusi kecil saya terus berlanjut dan membawa kebahagiaan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia. Terus semangat untuk UNICEF Indonesia dan Pendekar Anak!

Silvia Meliana,
Pendekar Anak sejak tahun 2015

Sebagai salah satu Pendekar Anak UNICEF, saya percaya bahwa setiap anak berhak tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang cerah. Melalui berbagai pengalaman, saya meyakini program-program UNICEF seperti Manajemen Masalah Gizi Akut telah membantu anak-anak yang mengalami gizi buruk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Ini menguatkan keyakinan saya bahwa dengan dukungan kita semua melalui UNICEF, kita wujudkan lebih banyak anak Indonesia dapat bertumbuh dengan baik dan mencapai potensi penuh mereka.

Ardi Pangestu,
Pendekar Anak sejak 2010



Saya berharap melalui dukungan ini tidak ada lagi anak yang kekurangan gizi dan semua dapat bersekolah. Semangat terus untuk UNICEF dalam misinya meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia! Saya tunggu berita-berita baiknya dalam mengembalikan senyum mereka. Untuk Pendekar Anak dan donatur lainnya, mari kita terus sebarkan kebaikan dan menjadi berkat bagi sekitar.

Eric Wijaya,
Pendekar Anak sejak 2017



Senang rasanya bisa turut mendukung program baik dan mulia untuk anak-anak Indonesia melalui UNICEF. Donasi yang saya berikan pun dipergunakan dengan baik, terbukti dari laporan kegiatan yang rutin saya terima. Semoga UNICEF makin berkembang dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia sehingga semakin banyak anak yang bisa meraih masa depan yang lebih baik.

Victima Penta Hapsari,
Pendekar Anak sejak 2021



Meraih Dampak dengan Bakat dan Jangkauan Figur Publik

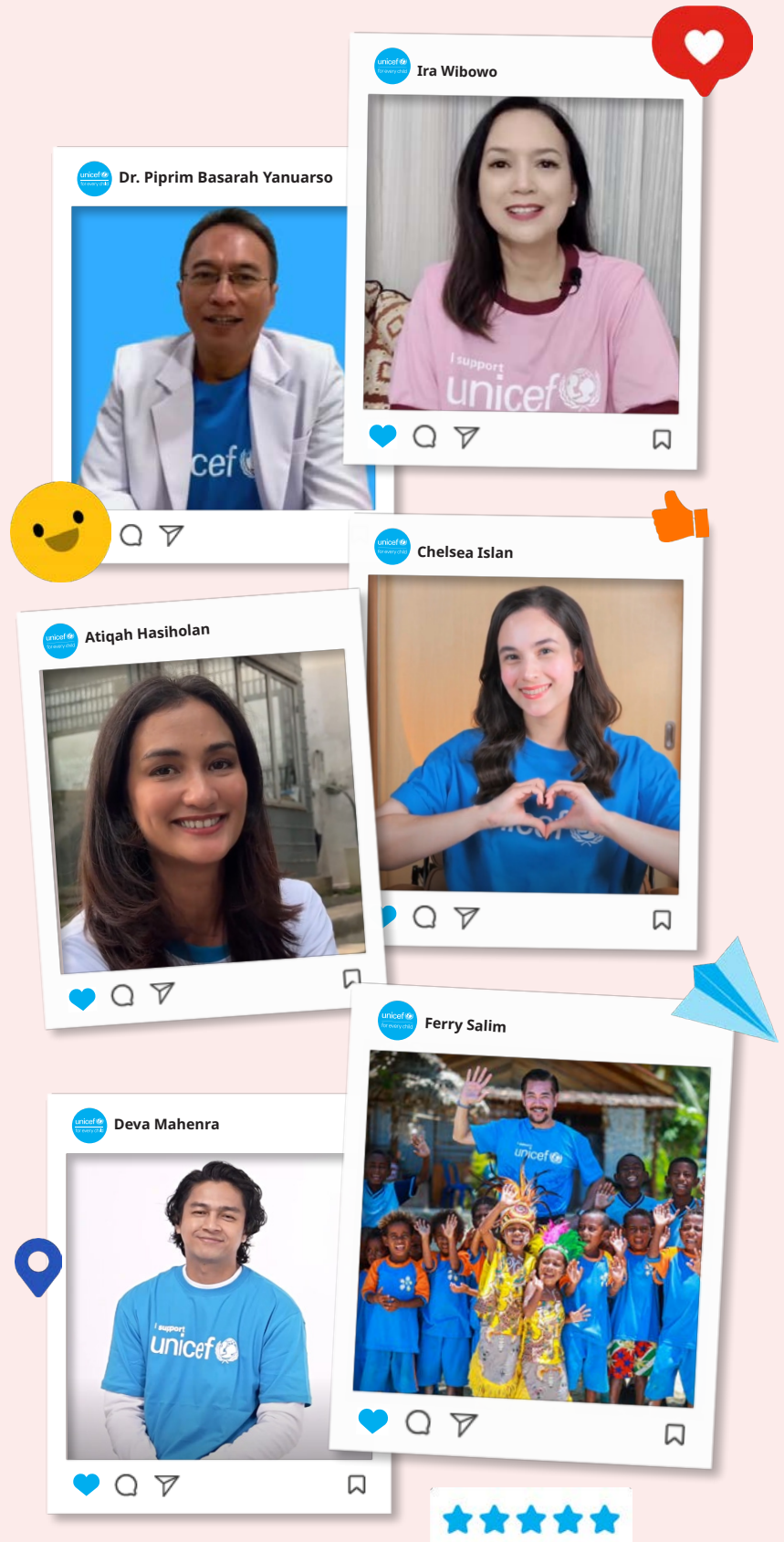
Pada 2024, UNICEF bermitra dengan 35 figur publik—termasuk selebritas, kreator konten, aktivis sosial, dan para pakar—untuk menguatkan penyebaran pesan-pesan advokasi. Suara mereka membantu meningkatkan interaksi di beragam platform digital dan kegiatan publik. Melalui platform mereka dan kanal komunikasi UNICEF, lebih dari 32,8 juta orang telah dijangkau.

Influencer berperan penting dalam banyak kegiatan penting, termasuk perayaan Hari Anak Sedunia, Hari Anak Nasional, dan kampanye “Setiap Anak Berhak”. Mereka juga mendukung penggalangan dana untuk perayaan Hari Kemerdekaan dan Ramadan, respons wabah polio, promosi imunisasi rutin, advokasi pemberian ASI, dan inisiatif untuk membangun kesadaran seputar kesehatan mental.

Di luar media sosial, kemitraan jangka panjang kami dengan biro media memastikan bahwa pesan-pesan kami dapat tampil di ruang-ruang publik yang strategis, antara lain melalui iklan layanan masyarakat pada media luar ruang, seperti layar di tempat umum. Upaya ini saja mampu menjangkau 12 juta orang dengan pesan-pesan advokasi mengenai hak-hak anak, imunisasi, dan kesehatan masyarakat.

Tahun 2024 menandai tahun ke-20 sejak Ferry Salim pertama kali ditunjuk sebagai Duta Nasional UNICEF Indonesia. Merayakan momen ini, Ferry mengunjungi sebuah PAUD Holistik-Integratif di Papua dan membangun kesadaran tentang pentingnya investasi berkelanjutan pada Pembelajaran Kelas Muda.

Untuk menyimak advokasi lain yang melibatkan *influencer*, silakan klik nawala kami: <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/influencer>



Mengangkat Suara Muda, Ciptakan Perubahan yang Bermakna



Seorang komunikator muda mengedukasi anak-anak tentang pencegahan HPV di Jayapura, Provinsi Papua, setelah belajar tentang keterampilan komunikasi interpersonal dalam lokakarya UNICEF.

©Porkesmas

Untuk mendukung kesejahteraan remaja, UNICEF meluncurkan FunDoo, *chatbot* edukasi yang membahas topik-topik penting seperti kesehatan mental, pengendalian merokok, dan HPV. Lebih dari 28.000 pengguna telah mengakses informasi FunDoo.

Melalui *Youth-Led Action Initiative*, UNICEF mendukung lebih dari 400 anak muda membangun keterampilan advokasi dan komunikasi interpersonal serta menyediakan pendanaan pertama bagi 10 organisasi pimpinan anak muda dan 53 individu yang menjangkau total lebih dari 13.000 anak dan remaja melalui kampanye advokasi mereka tentang imunisasi rutin, kesehatan mental, pencegahan kekerasan, iklim, dan kesehatan reproduksi. Dengan membina kepemimpinan dan kemampuan advokasi anak muda, mereka pun secara aktif turut memengaruhi kebijakan dan program yang berdampak terhadap masa depannya.

Silakan klik tautan berikut untuk melihat sorotan tahunan dari inisiatif pelibatan remaja dan anak muda dari UNICEF Indonesia: <https://bit.ly/publikasiureport>

Salah satu aspek penting dalam misi UNICEF adalah memastikan agar pendapat remaja dan anak muda didengar dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Pada 2024, hampir 100.000 anak muda baru bergabung dengan platform U-Report dari UNICEF, sehingga jumlah U-Reporter kini mencapai 1,1 juta orang. Melalui jajak pendapat di U-Report, UNICEF menghimpun pandangan dari hampir 190.000 anak muda tentang 11 topik utama. Masukan mereka pun disertakan dalam diskusi kebijakan pada forum-forum global, seperti Forum Air Dunia dan Forum TIK ASEAN untuk Perlindungan Anak Di Dunia Maya.



Anak-anak muda mempromosikan *chatbot* FunDoo, konselor hidup digital untuk masalah kesehatan mental, di Bandung, Provinsi Jawa Barat

©UNICEF/Pilav

Publikasi

Studi Dasar tentang Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Orang Tua dan Anak-anak di Indonesia

Studi *baseline* ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi anak di dunia maya dan meningkatkan efektivitas intervensi keselamatan anak di dunia maya. Studi menunjukkan penggunaan internet yang tinggi di kalangan anak yang menghadapi risiko signifikan, seperti paparan konten yang tidak pantas, perundungan di dunia maya, dan penganiayaan dan eksploitasi seksual.



Desk Review: Input Into Malaria Communication Strategy to Accelerate Malaria Elimination

Dilaksanakan untuk memperbarui strategi komunikasi malaria, tinjauan ini menyajikan informasi penting tentang perilaku manusia yang menjadi prasyarat bagi eliminasi malaria, cara menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi strategi komunikasi malaria yang efektif, dan contoh-contoh dari pendekatan berbasis masyarakat yang telah terbukti berhasil.



Ringkasan Penelitian Program Pengembangan Anak Usia Dini: Evaluasi Dampak Program Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD).



Early Childhood Development Programme Research Brief

Helping vulnerable young children recover from the impact of COVID-19 and reimagine their future

Studi ini mengevaluasi dampak program PAUD dalam mendukung anak-anak rentan selepas pandemi COVID-19. Dengan data dari enam kota/kabupaten, studi menyoroti hasil positif dalam pembelajaran usia dini dan

merekomendasikan pendidikan pra-sekolah dasar tersedia secara universal, pembelajaran berbasis permainan, literasi usia dini, dan kolaborasi lintas sektor untuk menguatkan layanan PAUD di seluruh Indonesia.

Apa yang Ada di Pikiran Anak Muda? Pandangan Anak Muda Seputar Isu Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH) di Indonesia

Laporan ini mencatat pandangan anak muda tentang tantangan air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) di Indonesia serta menggarisbawahi kesenjangan edukasi WASH. Laporan merangkum suara-suara anak muda yang dikumpulkan melalui survei di U-Report dengan tujuan menjadi dasar sekaligus menginspirasi pemangku kepentingan dan praktisi WASH untuk mau belajar dari dan melibatkan anak muda.



Perubahan Iklim dan Gizi di Indonesia: Tinjauan Bukti Untuk Penguatan Kebijakan dan Program

Laporan ini menganalisis dampak perubahan iklim terhadap status gizi anak di Indonesia yang masih terus mengalami tantangan masalah gizi dan kerawanan pangan. Melalui temuannya, laporan ingin membantu pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan ketangguhan iklim ke dalam strategi gizi untuk memastikan anak yang rentan mendapatkan dukungan lebih besar di tengah tantangan lingkungan dan ekonomi yang kian berat.



Integrated Socio-Economic Registration System for Indonesia: Consolidated Design Report



Laporan ini menguraikan desain dan implementasi kerangka sistem Registrasi Sosio-Ekonomi (Regsosek) Indonesia yang dibuat untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial. Untuk memastikan keberhasilan Regsosek, laporan merekomendasikan, antara lain, penyusunan pedoman operasional, model klasifikasi tingkat kesejahteraan, kerangka perlindungan data, struktur hukum, dan sistem pelatihan dan pemantauan.

Analisis Lanskap Iklim untuk Anak-anak di Indonesia: Kajian Keterkaitan Iklim, Lingkungan, Energi, dan Anak di Indonesia



Laporan perdana dari UNICEF Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menelaah dampak iklim, lingkungan hidup, dan energi terhadap anak. Di samping menyoroti risiko dan kesenjangan kebijakan, laporan juga memberikan rekomendasi strategi untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam aksi iklim serta menyatakan masih terbatasnya pelibatan anak dalam pembuatan kebijakan di sektor sosial.



Terima Kasih!

Kami berterima kasih kepada semua donor atas dukungan mereka sepanjang 2024.

Pemerintah \$ 8.738.561

Amerika Serikat
Australia
Belanda
China
Indonesia
Inggris
Jepang
Jerman
Kanada
Republik Korea

Kontribusi melalui Kantor Komite Nasional UNICEF \$ 5.174.265

Australian Committee for UNICEF
Belgian Committee for UNICEF
Danish Committee for UNICEF
German Committee for UNICEF
Japan Committee for UNICEF
Netherlands Committee for UNICEF
Switzerland Committee for UNICEF
United Kingdom Committee for UNICEF
United States Fund for UNICEF

Kontribusi melalui Badan PBB lain \$ 1.338.108

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
United Nations Development Programme (UNDP) - Multi-Partner Trust Fund
United Nations Population Fund (UNFPA)

Lain-lain \$ 1.066.753

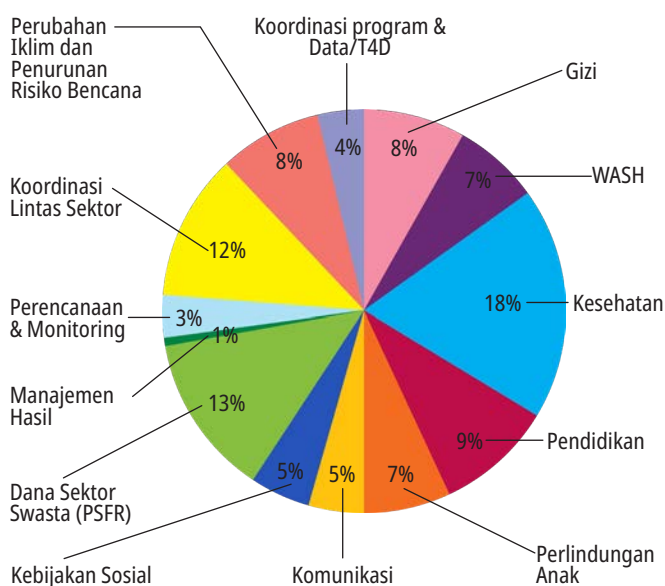
Safe Online
European Union
GAVI The Vaccine Alliance
Global Partnership for Education

Sumber Daya Global UNICEF \$ 7.158.480

Dana Tergalang \$8.175.650

Donor individu \$6.924.276
Perusahaan dan yayasan (kontribusi dari Prudence Foundation, Tanoto Foundation, WINGS Group Indonesia dan donor lain) \$1.251.374

Pemanfaatan Dana



Catatan:

Donasi yang diberikan dalam IDR ditampilkan dalam US\$ dan berdasarkan nilai tukar PBB pada 31 Desember 2024.



Anak-anak muda mempromosikan *chatbot* FunDoo, konselor hidup digital untuk masalah kesehatan mental, di Bandung, Provinsi Jawa Barat.

© UNICEF/UNI728221/Nuraeni



Selama lebih dari 70 tahun, hak-hak anak telah menjadi inti dari kemitraan yang kuat antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF. Kegiatan UNICEF di Indonesia didorong oleh tujuan utama untuk memastikan setiap anak, terutama yang paling rentan, mendapatkan awal kehidupan yang adil dan setara. Ini berarti semua anak perempuan dan laki-laki—tanpa memandang lokasi, tingkat pendapatan keluarga, atau disabilitas—harus memiliki akses yang sama terhadap layanan berkualitas dan kesempatan yang setara untuk berkembang secara optimal.

Baik di lapangan maupun di koridor kementerian, UNICEF memberikan panduan teknis dan praktis kepada lembaga pemerintah dalam perencanaan yang berpusat pada anak, serta saran kebijakan tingkat tinggi dan upaya advokasi untuk memastikan akses yang adil terhadap layanan penting bagi 80 juta anak di Indonesia.

Melalui penilaian tantangan dan eksplorasi solusi bersama pemerintah daerah, mitra masyarakat sipil, sektor swasta, serta anak-anak dan remaja itu sendiri, UNICEF membantu memastikan bahwa program-program untuk anak-anak relevan dan berkelanjutan.

Selain kantor pusat di Jakarta, UNICEF memiliki tujuh kantor lapangan di Jawa Timur, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua yang memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan spesifik di wilayah tersebut, serta defisit layanan di masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, baik di pedesaan maupun perkotaan.

Dengan mendukung Pemerintah dalam mengutamakan anak-anak, serta melalui keterlibatan mitra dan masyarakat, UNICEF berupaya menjaga hak setiap anak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.